

NOMOR :
LAMPIRAN :
PERIHAL :

Lampiran 1.1
Kepada Yth.
..... (1)
.....
Di-
..... (2)

- I. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. NAMA : 3)

NPWP : 4)

Alamat : 5)
- II. LABA/RUGI PERUSAHAAN 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

URAIAN	TAHUN PAJAK		
	19.....	19.....	19.....
1	2	3	4
1. Laba Komersial Koreksi untuk menghitung PPh + Jumlah Koreksi Positif - Jumlah Koreksi Negatif Penghasilan Netto Penghasilan Kena Pajak 2. Tanggal SPT PPh dimasukkan			

- III. PEMBAYARAN PAJAK TAHUN BERJALAN
- BULAN S/D BULAN

JENIS PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR	KETERANGAN
1	2	3

- IV. PEMBAYARAN ATAS KETETAPAN PAJAK

Lampiran I.2

TAHUN PAJAK	JENIS PAJAK	JENIS KETETAPAN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	PEMBAYARAN
1	2	3	4	5

- V. PEMBAYARAN ATAS PBB TAHUN TERAKHIR MENURUT WAJIB PAJAK

TAHUN PAJAK	ALAMAT OBYEK PAJAK	JUMLAH PBB YANG HARUS DIBAYAR	KETERANGAN
1	2	3	4

..... 19 (6)

..... (7)

..... (8)

..... (9)

VI. KOREKSI UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN
(KOREKSI POSITIF DAN KOREKSI NEGATIF)

NOMOR URUT	URAIAN POS-POS RUGI/LABA	PERHITUNGAN KOMERSIAL	PERHITUNGAN FISKAL	KOREKSI FISKAL	
				POSITIF	NEGATIF
1	2	3	4	5	8
JUMLAH					

.....ttd..... 19
Nama Wajib Pajak

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Data perpajakan atas nama
PT
NPWP

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
di
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Surat Keterangan Fiskal dari Wajib Pajak tanggal
Nomor / berita fax dari Direktur Pajak Penghasilan Nomor Fax
tanggal Perihal tersebut diatas dengan ini disampaikan data perpajakan dimaksud sebagai
berikut :

1. SPT Tahunan PPh

Tahun Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Tanggal SPT diterima KPP

2. PPh Final sesuai dengan jenis usahanya (yang dibayar sendiri/dipungut pihak lain sebagai penghasilan WP) dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Tahun Pajak	Jenis Obyek PPh	PPh Final yang dibayar

3. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan (bulan s/d bulan)
Termasuk PPh Final yang dibayar sendiri dan dipungut oleh pihak lain.

Nomor Urut	Jenis Pajak	Jumlah Pembayaran	Jumlah Pembayaran yang seharusnya

4. Tunggakan Pajak

Jenis Pajak	Tunggakan	Keterangan

LAMPIRAN II.2

5. Daftar Saham Pendiri

No.	Nama	NPWP	Juml. Saham	Nilai Saham

6. Pembayaran PBB tahun terakhir menurut Wajib Pajak

Tahun Pajak	Jumlah SPPT/STTS	Jumlah PBB yang harus dibayar	Keterangan

Oleh karena Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya/tidak memenuhi kewajiban perpajakannya *).
Maka permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal dapat dikabulkan/agar ditolak *).

Demikian untuk dapat dimaklumi

..... 19.....
Kepala,

.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

TAX CLEARANCE / SURAT KETERANGAN FISKAL

1. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang akan go public untuk mengajukan permohonan Tax Clearance / Surat keterangan Fiskal
2. Penjelasan Pengisian
Angka 1) dan 2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dan nama Kantor Pelayanan Pajak tersebut.
Jika permohonan diajukan melalui BAPEPAM maka diisi dengan :

Direktur Jenderal Pajak
Melalui ketua BAPEPAM
di Jakarta

- Angka 3) s/d 5) : Diisi dengan nama badan usaha, NPWP dan alamat pemohon.
Angka 6) : Diisi nama tempat dan tanggal permohonan dibuat
Angka 7) : Diisi nama Badan Usaha pemohon
Angka 8) : Diisi tanda tangan pemohon
Angka 9) : Diisi nama jelas pemohon

Angka Romawi II
Kolom 2,3,4 : Diisi dengan tahun pajak dan laba yang diperoleh maupun tanggal pemasukan SPT tahunan PPh, untuk 3 (tiga) tahun terakhir sejak saat pengajuan permohonan. Jumlah Koreksi Positif adalah yang menambah Penghasilan Kena Pajak sedangkan yang dimaksud Koreksi Negatif ialah koreksi yang mengurangi Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan neraca rekonsiliasi menurut Laporan Keuangan Pemohon dibandingkan dengan perhitungan menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Baik Koreksi positif maupun koreksi negatif dirinci untuk setiap tahun pajak pada lampiran tersendiri (Lampiran I.3 angka romawi VI)

Angka Romawi III
Kolom 1 : Diisi dengan PPh Pasal 25, Pasal 21 (termasuk PPh final) dan PPN
Kolom 2 : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak misalnya STP,SKPKB, dan SKPKBT.
Kolom 3 : Diisi dengan besarnya pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam STP,SKPKB, dan SKPKBT.

Angka Romawi IV
Kolom 1 dan 2 : Cukup jelas
Kolom 3 : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak misalnya STP,SKPKB, dan SKPKBT.
Kolom 4 : Diisi dengan besarnya pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam STP,SKP, dan/atau STP,SKP DAN SKPT
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang telah disetor untuk melunasi pajak yang masih terutang dalam kolom 4

Angka Romawi V
Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : Diisi dengan alamat obyek sesuai SPPT atau STTS
Kolom 3 : Diisi dengan besarnya PBB yang dibayar sesuai STTS
Kolom 4 : Diisi Lunas/Belum Lunas

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

Alamat Kanwil

Telpon :
Fax :

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : SR-
Tanggal :

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa kewajiban perpajakan dari perusahaan :

Nama :
NPWP :
Alamat :

Adalah sebagai berikut :

1. Tunggakan Pajak sampai saat ini :

PPH	PPN	PBB
Nihil	Nihil	Nihil
2. SPT Tahunan PPh :

Tahun Pajak	Penghasilan Kena Pajak
	Rp
	Rp
	Rp
3. PPh Final :

Tahun Pajak	Obyek	PPh Final
-------------	-------	-----------
4. PBB yang dibayar menurut Wajib Pajak

Tahun Pajak	Jumlah SPPT/STTS	PPh Final
-------------	------------------	-----------

Surat Keterangan ini diberikan untuk memenuhi permohonan Wajib Pajak dengan Surat Nomor : tanggal

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

Jln :
.....

Telpon :
Fax :

Nomor :
Hal : Kelengkapan Permohonan Tax Clearence

Yth :
Nama :
NPWP :
Alamat :

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal tentang permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF), dengan ini diminta Saudara segera melengkapi data yang dapat kami terima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat ini, yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Apabila kelengkapan data tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Tax Clearence Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut.

Kepala

.....
.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
JL.

SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

NOMOR :
TANGGAL :

Direktur Jenderal Pajak menerangkan :

Nama :
NPWP :
Alamat :

Bahwa kepada perusahaan tersebut tidak dapat diberikan Surat Keterangan Fiskal, karena :

- ☐ tidak menyampaikan Laporan Keuangan dan Neraca Rekonsiliasi yang telah diaudit Akuntan Publik
- ☐ mempunyai tunggakan pajak atas ketetapan PPh/PPN/PBB
- ☐ tidak melunasi kewajiban perpajakan untuk jenis PPh Pasal 21/PPh Pasal 22/ PPh Pasal 23/PPh Pasal 25/ PPh Pasal 26/PPN/PPnBM dan PPh Final

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala

NIP